

ISLAM DAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Tri Astutik Haryati

Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan

Abstract: The core of multiculturalism is the willingness to receive other groups as an equal and united part. It denies cultural, ethnical, gender, language and religious distinctions. Multiculturalism becomes a contextual idea relating to the current contemporary society. The basic principles of equity, justice, openness, and difference recognition are the value principle needed by human in the crush of global culture. Thus, education has been an appropriate media to establish multiculturalism. As a result, it is urgently required to design a curriculum of multicultural education containing some materials that are able to present multiperspectives of certain cultural phenomena.

Kata kunci: Islam, multikultural, pendidikan agama multikultural

Pendahuluan

Di antara idealitas keagamaan Islam sebagaimana tertulis dalam al-Qur'an¹ adalah untuk saling mengenal dan menghormati berbagai budaya, ras, dan agama sebagai suatu realitas kemanusiaan. Akan tetapi pada saat yang sama peta dunia diwarnai konflik akibat SARA. Kesenjangan antara idealitas dan realitas itulah yang perlu dijembatani dengan memberikan pemahaman multikultural dalam proses pendidikan keislaman.

Sebagai sebuah konsep, pendidikan multikultural menemukan relevansinya untuk konteks Indonesia. Pendidikan multikultural sejalan dengan semboyan bangsa Indonesia "Bhinneka Tunggal Ika" yang memiliki pengertian bahwa Indonesia merupakan salah satu bangsa di dunia yang terdiri dari beragam suku, ras, budaya, bahasa, dan agama yang berbeda-beda tetapi dalam kesatuan Indonesia.

¹QS. al-Hujurat : 13

Pemaknaan secara negatif terhadap persoalan keragaman telah menambah daftar panjang terjadinya konflik yang menimbulkan desintegrasi bangsa. Karena itu, untuk mengatasi problem kemanusiaan yang ada, tidak bisa lain kecuali dengan menggunakan pendekatan yang multidimensional. Di sinilah diskursus dan implementasi multikulturalisme dalam pendidikan menemukan tempatnya yang berarti.

Dalam konteks ini pendidikan multikultural merupakan pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan dan budaya masyarakat secara menyeluruh, sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 4 ayat 1 yang berbunyi bahwa pendidikan nasional diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.²

Doktrin Islam juga mengajarkan paham pluralitas keagamaan.³ Bagi orang Islam, dianut suatu keyakinan bahwa sampai hari ini pun di dunia ini akan terdapat keragaman agama. Meskipun ada klaim bahwa kebenaran agama ada pada Islam,⁴ namun dalam al-Qur'an juga disebutkan adanya hak orang lain untuk beragama. Dan agama tidak bisa dipaksakan kepada orang lain.⁵ Sikap inilah yang menjadi prinsip pada masa kejayaan Islam sekaligus mendasari kebijakan politik kebebasan beragama.

²UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: Cemerlang, 2003), hlm. 8.

³Ajaran kemajemukan keagamaan itu menandakan pengertian bahwa semua agama diberi kebebasan untuk hidup, dengan resiko yang akan ditanggung oleh para pengikut agama itu masing-masing, baik itu secara pribadi maupun kelompok. Sikap ini dapat ditafsirkan sebagai suatu harapan kepada semua agama yang ada, yaitu karena semua agama pada mulanya menganut prinsip yang sama, yaitu keharusan manusia untuk berserah diri kepada Yang Maha Esa, maka agama-agama itu, baik karena dinamika internalnya sendiri atau karena persentuhan nilai satu sama lain, akan secara berangsur-angsur menemukan kebenaran asalnya sendiri, sehingga semuanya akan bertumpu pada satu titik pertemuan atau dalam terminologi al-Qur'an disebut *kalimah sawā'*.

⁴QS. Āli 'Imrān : 13.

⁵QS. al-Baqarah : 256.

Inklusivisme Islam tersebut juga memberikan formulasi bahwa Islam adalah agama terbuka. Islam menolak eksklusivisme, absolutisme dan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pluralisme. Hal inilah yang perlu ditanamkan pada peserta didik dalam pendidikan agama Islam agar bisa melahirkan sikap inklusif sekaligus toleransi positif di kalangan umat beragama, sejalan dengan semangat al-Qur'an agar fenomena lahiriah tidak menghalangi usaha untuk menuju titik temu (*kalimah sawā'*) antara semuanya.⁶

Bertolak dari pandangan ini, Islam dimungkinkan dapat menjadi pijakan bagi pendidikan multikultural tersebut. Dengan demikian dapat berguna untuk menghadapi berbagai fenomena keagamaan di masa depan. Sebuah harapan baik bagi kehidupan berbangsa karena peta dunia sekarang ini ditandai oleh konflik-konflik sosial dengan warna keagamaan, meskipun agama bukan satu-satunya faktor, namun jelas sekali bahwa pertimbangan keagamaan dalam konflik-konflik itu dalam eskalasinya banyak memainkan peran.

Pengertian Multikultural

Secara sederhana multikultural berarti "keberagaman budaya".⁷ Sebenarnya ada tiga istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan masyarakat yang mempunyai keberagaman tersebut (agama, ras, bahasa, dan budaya yang berbeda) yaitu pluralitas (*plurality*), keragaman (*diversity*), dan multikultural (*multicultural*). Ketiga ekspresi itu sesungguhnya tidak merepresentasikan hal yang sama, walaupun semuanya mengacu kepada adanya 'ketidaktunggalan'.⁸ Inti dari multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, jender, bahasa, ataupun agama. Apabila pluralitas sekedar merepresentasikan adanya kemajemukan (yang lebih dari satu), multi-

⁶QS. Āli 'Imrān : 64.

⁷Scott Lash dan Mike Featherstone (ed.), *Recognition And Difference: Politics, Identity, Multiculture* (London: Sage Publication, 2002), hlm. 2-6.

⁸Konsep pluralitas mengandaikan adanya 'hal-hal yang lebih dari satu' (*many*); keragaman menunjukkan bahwa keberadaan yang 'lebih dari satu' itu berbeda-beda, heterogen, dan bahkan tak dapat disamakan. Dibandingkan dua konsep sebelumnya, multikulturalisme sebenarnya relatif baru. Secara konseptual terdapat perbedaan signifikan antara pluralitas, keragaman, dan multikultural.

kulturalisme memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu mereka adalah sama di ruang publik.

Diversitas dalam masyarakat menurut Bikhu Parekh bisa dikategorikan dalam tiga hal. *Pertama*, perbedaan subkultur (*subculture diversity*), yaitu individu atau sekelompok masyarakat yang hidup dengan cara pandang dan kebiasaan yang berbeda dengan komunitas besar dengan sistem nilai atau budaya pada umumnya yang berlaku. *Kedua*, perbedaan dalam perpektif (*perspectival diversity*), yaitu individu atau kelompok dengan perpektif kritis terhadap *mainstream* nilai atau budaya mapan yang dianut oleh mayoritas masyarakat di sekitarnya. *Ketiga*, perbedaan komunalitas (*communal diversity*), yakni individu atau kelompok yang hidup dengan gaya hidup yang *genuine* sesuai dengan identitas komunal mereka (*indigeneous people way of life*).

Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk saja, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan.⁹

Multikulturalisme adalah kearifan untuk melihat keanekaragaman budaya sebagai realitas fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Kearifan ini terwujud apabila seseorang membuka diri untuk menjalani kehidupan bersama dengan melihat realitas plural sebagai sebuah kemestian yang tidak bisa diingkari ataupun ditolak, apalagi dimusnahkan.

Persoalan yang kemudian muncul dalam masyarakat majemuk adalah konflik, yang dengan sendirinya bisa mengguncang tatanan sosial yang telah lama mengakar. Sehingga multikulturalisme sebenarnya merupakan buah perjalanan panjang intelektual manusia setelah berjumpa dan bergelut dengan berbagai konflik. Multikulturalisme adalah posisi intelektual yang menyatakan keberpihakannya pada

⁹Parsudi Suparlan, "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural," dalam *Makalah* yang diseminarkan pada Simposium Internasional ke-3, Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002, hlm.1.

pemaknaan terhadap persamaan, keadilan, dan kebersamaan untuk memperkecil ruang konflik yang destruktif.¹⁰

Dengan demikian multikulturalisme harus berbasis pada pandangan filsafat yang melihat konflik sebagai fenomena permanen yang lahir bersamaan dengan keanekaragaman dan perubahan yang dengan sendirinya selalu terbawa oleh kehidupan itu sendiri. Secara positif hal tersebut bisa dimaknai sebagai sesuatu yang positif untuk memperkaya spiritualitas dan memperkuat iman. Dengan demikian multikulturalisme bisa diibaratkan seperti burung yang terbang ke angkasa, keluar dari batas-batas keberpihakan yang destruktif, melintasi batas-batas konflik untuk memberikan solusi alternatif yang mencerdaskan dan mencerahkan.

Sebagai sebuah ide, multikulturalisme diwacanakan pertama kali di Amerika dan negara-negara Eropa Barat pada tahun 1960-an oleh gerakan yang menuntut diperhatikannya hak-hak sipil (*civil right movement*). Tujuan utama dari gerakan ini adalah untuk mengurangi praktik diskriminasi di tempat-tempat publik, di rumah, di tempat-tempat kerja, dan di lembaga-lembaga pendidikan, yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Selama itu, di Amerika dan negara-negara Eropa Barat hanya dikenal adanya satu kebudayaan, yaitu kebudayaan kulit putih yang Kristen. Golongan-golongan lainnya yang ada dalam masyarakat tersebut dikelompokkan sebagai minoritas dengan pembatasan hak-hak mereka.¹¹

Gerakan hak-hak sipil ini, menurut James A. Banks,¹² berimplikasi pada dunia pendidikan, dengan munculnya beberapa tuntutan untuk melakukan reformasi kurikulum pendidikan yang sarat dengan diskriminasi. Pada awal tahun 1970-an muncullah sejumlah kursus dan program pendidikan yang menekankan pada aspek-aspek yang berhubungan dengan etnik dan keragaman budaya (*cultural diversity*).

Multikulturalisme menjadi gagasan yang cukup kontekstual dengan realitas masyarakat kontemporer saat ini. Prinsip mendasar tentang kesetaraan, keadilan, keterbukaan, dan pengakuan terhadap

¹⁰Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 32.

¹¹Suparlan, "Menuju Masyarakat," hlm. 2-3.

¹²James A. Banks (ed.), *Multicultural Education: Issues and Perspectives* (London: Allyn and Bacon Press, 1989), hlm. 4-5.

perbedaan adalah prinsip nilai yang dibutuhkan manusia di tengah himpitan budaya global. Dan pendidikan merupakan sarana yang tepat untuk membangun kesadaran multikultural tersebut. Hal ini karena pendidikan multikultural berusaha mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan kemudian mensikapi dengan penuh toleran dan semangat egaliter.

Pendidikan Multikultural di Indonesia

Terdapat dua istilah yang sering digunakan dalam dunia pendidikan yaitu "pedagogi" dan "pedagogik". Pedagogi berarti pendidikan, sedangkan pedagogik berarti ilmu pendidikan.¹³

Secara sederhana, pendidikan adalah usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi bawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan.¹⁴

Menurut Driyarkara, pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia muda. Pengangkatan manusia ke taraf insani itulah yang disebut mendidik.¹⁵ Hal ini mengandung pengertian bahwa melalui pendidikan manusia akan menyadari siapa dirinya dan hubungannya dengan makhluk lain yang berada di sekitarnya.

Dalam pengertian yang luas pendidikan sama dengan hidup, dalam arti segala situasi dalam hidup yang mempengaruhi pertumbuhan seseorang. Pendidikan juga bisa diartikan sebagai keseluruhan pengalaman belajar setiap orang sepanjang hidupnya. Sehingga pendidikan tidak berlangsung dalam batas usia tertentu tetapi sepanjang hidup manusia.¹⁶

Sedangkan pendidikan multikultural pada prinsipnya adalah pendidikan yang menghargai perbedaan. Pendidikan multikultural senantiasa menciptakan suatu proses di mana setiap kebudayaan bisa melakukan ekspresi. Akan tetapi tidak mudah untuk mendesain pendidikan multikultural secara praksis.

¹³Fuad Ihsan, *Dasar-dasar Kependidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2001), hlm. 1.

¹⁴Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, hlm. 32.

¹⁵Ihsan, *Dasar-dasar Kependidikan*, hlm.4 .

¹⁶Redja Mudyahardjo, *Filsafat Ilmu Pendidikan Suatu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 45-46.

Menurut Muhaimin el Ma'hady sebagaimana dikutip Choirul Mahfud mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam meresponi perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan (global).¹⁷

Menurut HAR Tilaar, pendidikan multikultural berawal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang "interkulturalisme" sesuai Perang Dunia II.¹⁸ Kemunculan gagasan tersebut selain terkait dengan perkembangan politik internasional menyangkut HAM, kemerdekaan dari kolonialisme, dan diskriminasi rasial juga meningkatnya pluralitas di negara-negara Barat sendiri sebagai akibat dari peningkatan migrasi dari negara-negara yang baru merdeka ke Amerika dan Eropa.

Pendidikan multikultural menemukan relevansinya untuk konteks Indonesia. Secara horizontal, berbagai kelompok masyarakat yang kini dikategorikan sebagai "bangsa Indonesia" dapat dipilah-pilah ke dalam berbagai suku bangsa, kelompok penutur bahasa, golongan penganut ajaran agama yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sedangkan secara vertikal, berbagai kelompok masyarakat itu bisa dibeda-bedakan atas *mode of production* yang bermuara pada perbedaan kelas sosial dan budaya.¹⁹

Pendidikan multikultural diharapkan dapat menyelesaikan persoalan konflik yang terjadi di masyarakat, atau—paling tidak—mampu memberikan penyadaran (*consciousness*) kepada masyarakat bahwa konflik bukan suatu hal yang baik untuk dibudayakan. Selanjutnya pendidikan juga harus mampu memberikan tawaran-tawaran yang mencerdaskan, antara lain dengan cara mendesain materi, metode, hingga kurikulum yang mampu menyadarkan masyarakat akan pentingnya sikap saling toleran, menghormati perbedaan suku, agama, ras, etnis, dan budaya masyarakat Indonesia yang multikultural.

Alasan lain yang melatarbelakangi adanya pendidikan multikultural adalah keberadaan masyarakat dengan individu-individu

¹⁷Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, hlm.176.

¹⁸H.A.R Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2002).

¹⁹Usman Pelly dan Asih Menanti, *Teori-teori Sosial Budaya* (Jakarta: Dirjen Depdikbud, 1994), hlm. 68.

yang beragam latar belakang bahasa dan kebangsaan (*nationality*), suku (*race or ethnicity*), agama (*religion*), gender, dan kelas sosial (*social class*). Keragaman latar belakang individu dalam masyarakat tersebut berimplikasi pada keragaman latar belakang peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan.²⁰

Dalam konteks Indonesia, peserta didik di berbagai lembaga pendidikan diasumsikan juga terdiri dari peserta didik yang memiliki beragam latar belakang agama, etnik, bahasa, dan budaya. Asumsi ini dibangun berdasarkan pada data bahwa di Indonesia terdapat 250 kelompok suku, 250 lebih bahasa lokal (*lingua franca*), 13.000 pulau, dan 5 agama resmi.²¹ Paling tidak keragaman latar belakang siswa di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia terdapat pada paham keagamaan, afiliasi politik, tingkat sosial ekonomi, adat istiadat, jenis kelamin, dan asal daerahnya (perkotaan atau pedesaan).

Selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang pendidikan multikultural bisa dilihat dari rumusan Sonia Nieto²² yaitu proses pendidikan yang komprehensif dan mendasar bagi semua peserta didik. Jenis pendidikan ini menentang bentuk rasisme dan segala bentuk diskriminasi di sekolah, masyarakat dengan menerima serta mengafirmasi pluralitas (etnik, ras, bahasa, agama, ekonomi, gender dan lain sebagainya) yang terefleksikan diantara peserta didik, komunitas mereka, dan guru-guru. Menurutnya, pendidikan multikultur ini haruslah melekat dalam kurikulum dan strategi pengajaran, termasuk juga dalam setiap interaksi yang dilakukan diantara para guru, murid dan keluarga serta keseluruhan suasana belajar mengajar. Karena jenis pendidikan ini merupakan pedagogi kritis, reflektif dan menjadi basis aksi perubahan dalam masyarakat, pendidikan multikultural mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi dalam berkeadilan sosial.

Menurut Lawrence J. Saha, pendidikan multikultural adalah suatu proses atau strategi pendidikan yang melibatkan lebih dari satu budaya, yang ditunjukkan melalui kebangsaan, bahasa, etnik, atau

²⁰Banks (ed.), *Multicultural*, hlm. 14.

²¹Leo Suryadinata, et.al, *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. 2003), hlm.30.

²²Sonia Nieto, *Language, Culture and Teaching* (Mahwah New York: Lawrence Erlbaum. 2002), hlm. 29.

kriteria rasial. Pendidikan multikultural dapat berlangsung dalam setting pendidikan formal atau informal, langsung atau tidak langsung. Pendidikan multikultural diarahkan untuk mewujudkan kesadaran, toleransi, pemahaman, dan pengetahuan yang mempertimbangkan perbedaan kultural, dan juga perbedaan dan persamaan antar budaya dan kaitannya dengan pandangan dunia, konsep, nilai, keyakinan, dan sikap.²³

Berbeda dengan itu James A. Bank melihat pendidikan multikultural dari tiga aspek yaitu konsep, gerakan, dan proses.²⁴ Dari aspek konsepnya, pendidikan multikultural dipahami sebagai ide yang memandang semua siswa—tanpa memperhatikan gender dan kelas sosial mereka, etnik mereka, ras mereka, dan atau karakteristik-karakteristik kultural lainnya—memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di kelas. Dari aspek gerakannya, pendidikan multikultural didefinisikan sebagai usaha untuk mengubah sekolah-sekolah dan institusi-institusi pendidikan sehingga siswa dari semua kelas sosial, gender, ras, dan kelompok-kelompok kultural memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Perubahan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada kurikulum, tetapi juga aspek lain seperti metode, strategi, manajemen pembelajaran, dan lingkungan sekolah. Dari aspek prosesnya, pendidikan multikultural dapat dipahami sebagai proses untuk mencapai tujuan agar kesetaraan pendidikan dapat dicapai oleh semua siswa. Kesetaraan pendidikan, seperti kemerdekaan dan keadilan tidak mudah dicapai, karena itu proses ini harus berlangsung terus-menerus.

Hal yang harus digarisbawahi dari diskursus multikulturalisme dalam pendidikan adalah identitas, keterbukaan, diversitas budaya dan transformasi sosial. Identitas sebagai salah satu elemen dalam pendidikan mengandaikan bahwa peserta didik dan guru merupakan satu individu atau kelompok yang merepresentasikan satu kultur tertentu dalam masyarakat. Identitas pada dasarnya *inheren* dengan sikap pribadi ataupun kelompok masyarakat, karena dengan identitas

²³Abdullah Aly, "Pendidikan Multikultural dalam Tinjauan Pedagogik" dalam *Makalah Seminar Pendidikan Multikultural sebagai Seni Mengelola Keragaman*. (Surakarta: Fak. Ekonomi UMS, Tanggal 8 Januari 2005), hlm.3.

²⁴Banks (ed.), *Multicultural*, hlm. 2-3.

tersebutlah, mereka berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain, termasuk pula dalam interaksi antar budaya yang berbeda.

Dengan demikian dalam pendidikan multikultur, identitas-identitas tersebut diasah melalui interaksi, baik internal budaya (*self critic*) maupun eksternal budaya. Oleh karena itu, identitas lokal atau budaya lokal merupakan muatan yang harus ada dalam pendidikan multikultur.

Dalam masyarakat ditemukan pelbagai individu atau kelompok yang berasal dari budaya berbeda, demikian pula dalam pendidikan, diversitas tersebut tidak bisa dielakkan. Diversitas budaya itu bisa ditemukan di kalangan peserta didik maupun para guru yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam satu proses pendidikan. Diversitas itu juga bisa ditemukan melalui pengkayaan budaya-budaya lain yang ada dan berkembang dalam konstelasi budaya, lokal, nasional dan global.

Oleh karena itu, pendidikan multikultur bukan merupakan satu bentuk pendidikan monokultur, akan tetapi model pendidikan yang berjalan di atas rel keragaman. Diversitas budaya ini akan mungkin tercapai dalam pendidikan jika pendidikan itu sendiri mengakui keragaman yang ada, bersikap terbuka (*openess*) dan memberi ruang kepada setiap perbedaan yang ada untuk terlibat dalam satu proses pendidikan.

Tujuan pendidikan multikultural dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu tujuan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan pembelajaran.²⁵ Yang terkait dengan aspek sikap (*attitudinal goals*) adalah untuk mengembangkan kesadaran dan kepekaan kultural, toleransi kultural, penghargaan terhadap identitas kultural, sikap responsif terhadap budaya, keterampilan untuk menghindari dan meregulasi konflik. Kemudian yang berkaitan dengan aspek pengetahuan (*cognitive goals*) adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang bahasa dan budaya orang lain, dan kemampuan untuk menganalisis dan menerjemahkan perilaku kultural, dan pengetahuan tentang kesadaran perspektif kultural. Sedangkan tujuan pendidikan multikultural yang berkaitan dengan pembelajaran (*instructional goals*) adalah untuk memperbaiki distorsi, stereotip, dan kesalahpahaman tentang kelom-

²⁵Aly, "Pendidikan Multikultural, hlm. 349.

pok etnik dalam buku teks dan media pembelajaran; memberikan berbagai strategi untuk mengarahkan perbedaan di depan orang; memberikan alat-alat konseptual untuk komunikasi antar budaya; mengembangkan keterampilan interpersonal; memberikan teknik-teknik evaluasi; membantu klarifikasi nilai; dan menjelaskan dinamika kultural.

Memperhatikan definisi dan tujuan pendidikan multikultural di atas, maka kurikulum pendidikan multikultural seharusnya berisi tentang materi-materi yang dapat menghadirkan lebih dari satu perspektif tentang suatu fenomena kultural. Untuk menghadirkan keragaman perspektif dalam kurikulum ini, menurut James A. Bank sebagaimana dikutip Zoran Minderovic²⁶ dapat dilakukan dengan empat tahapan, yaitu: (a) tahap kontribusi (*contribution level*), (b) tahap penambahan (*additive level*), (c) tahap perubahan (*transformative level*), dan (d) tahap aksi sosial (*social action level*).

Bila pada tahap kontribusi, kurikulum memfokuskan pada kebudayaan minoritas tertentu, maka pada tahap penambahan, kurikulum memperkenalkan konsep dan tema-tema baru—misalnya tema-tema yang terkait dengan multikulturalisme—dengan tanpa mengubah struktur kurikulum yang esensial. Selanjutnya, bila pada tahap perubahan, kurikulum memfasilitasi para siswa untuk melihat berbagai isu dan peristiwa dari perspektif budaya minoritas, maka pada tahap aksi sosial, kurikulum mengajak para siswa untuk memecahkan problem sosial yang disebabkan oleh persepsi budaya dalam satu dimensi.

Kurikulum berbasis multikultural juga perlu memasukkan materi dan bahan ajar yang berorientasi pada penghargaan kepada orang lain. Dalam hubungan ini, James Lynch²⁷ merekomendasikan agar sekolah atau guru menyampaikan pokok-pokok bahasan multikultural, dengan berorientasi pada dua tujuan, yaitu: (a) penghargaan kepada orang lain (*respect for others*), dan (b) penghargaan kepada diri sendiri (*respect for self*). Kedua bentuk penghargaan ini, mencakup tiga ranah pembelajaran (*domain of learning*). Ketiga ranah pembelajaran

²⁶Zoran Minderovic. *Multicultural Education/Curriculum*, dalam http://www.findarticle.com/cf_0/92602/0003/2602000388/p1/article.jhtml?term=pluralism. 2003, hlm. 2

²⁷James Lynch, *Multicultural Education: Principles and Practice*, (London: Routledge & Kegan Paul. 1986), hlm. 86-87.

tersebut adalah pengetahuan (*cognitive*), keterampilan (*psychomotor*), dan sikap (*affective*). Rekomendasi Lynch di atas mempertimbangkan hubungan yang kompleks antara dimensi intelektual dan emosional dalam perilaku siswa.

Sementara itu, H.A.R. Tilaar²⁸ menggariswahi bahwa model pendidikan yang dibutuhkan di Indonesia harus memperhatikan enam hal, yaitu; *Pertama*, pendidikan multikultural haruslah berdimensi “*right to culture*” dan identitas lokal. *Kedua*, kebudayaan Indonesia yang menjadi, artinya kebudayaan Indonesia merupakan *Weltanschauung* yang terus berproses dan merupakan bagian integral dari proses kebudayaan mikro. Oleh karena itu, perlu sekali untuk mengoptimalkan budaya lokal yang beriringan dengan apresiasi terhadap budaya nasional. *Ketiga*, pendidikan multikultural normatif yaitu model pendidikan yang memperkuat identitas nasional yang terus menjadi tanpa harus menghilangkan identitas budaya lokal yang ada. *Keempat*, pendidikan multikultural merupakan suatu rekonstruksi sosial, artinya pendidikan multikultural tidak boleh terjebak pada xenophobia, fanatisme dan fundamentalisme, baik etnik, suku, ataupun agama. *Kelima*, pendidikan multikultural merupakan pedagogik pemberdayaan (*pedagogy of empowerment*) dan pedagogik kesetaraan dalam kebudayaan yang beragam (*pedagogy of equity*). Pedagogik pembedayaan pertama-tama berarti, seseorang diajak mengenal budayanya sendiri dan selanjutnya digunakan untuk mengembangkan budaya Indonesia di dalam bingkai negara-bangsa Indonesia. Dalam upaya tersebut diperlukan suatu pedagogik kesetaraan antar-individu, antar suku, antar agama dan beragam perbedaan yang ada. *Keenam*, pendidikan multikultural bertujuan mewujudkan visi Indonesia masa depan serta etika bangsa. Pendidikan ini perlu dilakukan untuk mengembangkan prinsip-prinsip etis (moral) masyarakat Indonesia yang dipahami oleh seluruh komponen sosial-budaya yang plural.

²⁸HAR Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Grasindo. 2002), hlm. 185-190.

Revitalisasi Pendidikan Agama Islam dalam Pendidikan Multi-kultural

Pada umumnya, pendidikan agama yang diberikan di sekolah-sekolah tidak menghidupkan pendidikan multikultural yang baik, bahkan cenderung berlawanan. Akibatnya, konflik sosial sering kali diperkeras oleh adanya legitimasi keagamaan yang diajarkan dalam pendidikan agama di sekolah-sekolah daerah yang rawan konflik. Ini membuat konflik mempunyai akar dalam keyakinan keagamaan yang fundamental sehingga konflik sosial dan kekerasan semakin sulit diatasi, karena dipahami sebagai bagian dari panggilan agamanya.²⁹

Sebenarnya akar timbulnya berbagai konflik sosial yang mem-buahkan anarki yang berkepanjangan, seringkali memang tidak ada hubungannya dengan agama, tetapi dalam kenyataannya agama selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari berbagai konflik sosial tersebut.

Potensi konflik dan disintegrasi tersebut disebabkan karena agama dalam manifestasinya bersifat ambivalen terhadap persatuan dan kesatuan. Artinya, meskipun agama memiliki kekuatan pemer-satu, agama juga mempunyai kekuatan pemecah belah. Ada beberapa alasan menurut Din Syamsuddin mengapa agama memiliki ambi-valensi seperti itu, salah satunya adalah agama memiliki kecenderungan absolutistik yaitu kecenderungan untuk memutlakkan keyakinan keagamaannya sebagai kebenaran tunggal. Akibatnya muncul rejeksionis yaitu penolakan terhadap kebenaran agama lain³⁰ yang dianggap berbeda dari dan berlawanan dengan yang lain. Akar konflik keagamaan seperti ini kata Arthur D'Adamo karena para pemeluk agama mengambil sikap untuk memandang agama dari sudut pandang agamanya sendiri.³¹ Sehingga yang lebih mencuat ke permukaan bukannya esensi kebenaran yang hendak ditawarkan oleh agama, melainkan semangat untuk menegasikan yang lain.

²⁹Musa Asy'arie, *Pendidikan Multikultural dan Konflik Bangsa*. <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0409/03/opini/12465.htm>. 2004.

³⁰M. Din Syamsuddin, "Mengelola Pluralitas Agama" dalam *Jawa Pos*, (12 Mei 1996), hlm. 4-5.

³¹Budhy Munawar Rachman, "pengantar" dalam Komaruddin Hidayat dan Muhammad wahyuni Nafis, *Agama Masa Depan Perspektif Filsafat Perennial*. (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995), hlm. xxiv-xxvii.

Disebabkan oleh *truth claim* itulah, maka setiap agama menyatakan ajarannya merupakan totalitas sistem makna yang berlaku bagi seluruh kehidupan, baik individual maupun sosial sehingga secara kodrati cenderung menegaskan klaim kebenaran teologis yang dimilikinya. Namun ketika agama-agama itu hadir secara historis, ia berhadapan dengan pluralisme keagamaan sebagai realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat, maka akan berimplikasi pada perilaku sosial. Dalam konteks inilah pandangan inklusif sangat diperlukan untuk menerima kenyataan hidup pluralisme³² sebagai syarat mutlak bagi para penganut agama apapun.

Kenyataan menunjukkan bahwa pendidikan agama masih diajarkan dengan cara menafikan hak hidup agama yang lainnya, seakan-akan hanya agamanya sendirilah yang benar dan mempunyai hak hidup, sementara agama yang lain salah, tersesat dan terancam hak hidupnya, baik di kalangan mayoritas maupun yang minoritas. Semangat pendidikan keagamaan yang sempit ini, sudah barang tentu berlawanan secara fundamental dengan semangat pendidikan multikultural, dan akan memperlemah persatuan bangsa. Karena itu, pendidikan agama Islam harus direvitalisasi dan direaktualisasi secara kreatif dan berwawasan multikultural sehingga tidak kehilangan jiwa dan semangatnya.

Karena pada dasarnya masyarakat multikultural tidak hanya ciri khas masyarakat Indonesia. Dalam pengalaman paling dini historisitas keberagamaan Islam era kenabian Muhammad, masyarakat yang pluralistik secara religius telah terbentuk bahkan telah menjadi kesadaran umum pada saat itu. Kondisi demikian merupakan suatu kewajaran lantaran secara kronologis agama Islam memang muncul setelah beberapa agama yang telah ada sebelumnya.

³²Terdapat pengertian pluralitas yang belum tentu disertai pluralisme. Pluralitas adalah semata-mata kenyataan majemuk, sedangkan pluralisme adalah faham yang menerima kenyataan majemuk itu sebagai sesuatu yang positif. Pluralisme juga tidak semata-mata menunjukkan pada kenyataan tentang adanya kemajemukan akan tetapi yang dimaksud adalah keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Lihat Nurcholish Madjid, "Hak Asasi Manusia, Pluralisme Agama, dan Integrasi Nasional (konsep dan aktualisasi)" dalam *HAM dan Pluralisme Agama*. (Surabaya: PKSK, 1997), hlm. 71.

Bukti empiris sejarah peradaban Islam di masa lalu, menunjukkan Islam tampil secara inklusif dan sangat menghargai non-muslim.³³ Sikap inklusif ini ada karena al-Qur'an mengajarkan paham *religius plurality*.³⁴ Bagi orang Islam, dianut suatu keyakinan bahwa sampai hari ini pun di dunia ini akan terdapat keragaman agama. Meskipun ada klaim bahwa kebenaran agama ada pada Islam,³⁵ namun dalam al-Qur'an juga disebutkan adanya hak orang lain untuk beragama. Dan agama tidak bisa dipaksakan kepada orang lain.³⁶ Sikap inilah yang menjadi prinsip pada masa kejayaan Islam sekaligus mendasari kebijakan politik kebebasan beragama.

Inklusivisme Islam tersebut juga memberikan formulasi bahwa Islam adalah agama terbuka. Islam menolak eksklusivisme, absolutisme dan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pluralisme. Hal inilah yang perlu ditanamkan pada peserta didik dalam pendidikan agama Islam agar bisa melahirkan sikap inklusif sekaligus toleransi positif di kalangan umat beragama, sejalan dengan semangat al-Qur'an agar fenomena lahiriah tidak menghalangi usaha untuk menuju titik temu (*kalimat sawâ'*) antara semuanya.³⁷ Walaupun rumusan linguistik dan verbal keyakinan keagamaan itu berbeda-beda dapat dipastikan bahwa eksternalisasi keimanan itu dalam dimensi kemanusiaan tentu sama.

Ajaran tauhid dalam Islam mengandung pengertian adanya suatu orde yang satu sekaligus menyeluruh. Dengan kata lain, terdapat

³³Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1992), hlm. 102.

³⁴Ajaran kemajemukan keagamaan itu menandakan pengertian bahwa semua agama diberi kebebasan untuk hidup, dengan resiko yang akan ditanggung oleh para pengikut agama itu masing-masing, baik itu secara pribadi maupun kelompok. Sikap ini dapat ditafsirkan sebagai suatu harapan kepada semua agama yang ada: yaitu karena semua agama pada mulanya menganut prinsip yang sama, yaitu keharusan manusia untuk berserah diri kepada Yang Maha Esa, maka agama-agama itu, baik karena dinamika internalnya sendiri atau karena persentuhan nilai satu sama lain, akan secara berangsur-angsur menemukan kebenaran asalnya sendiri, sehingga semuanya akan bertumpu pada satu titik pertemuan atau dalam termonologi al-Qur'an disebut *kalimah sawâ'*.

³⁵QS. Âli Imrân : 13.

³⁶QS. al-Baqarah : 256.

³⁷QS. Âli 'Imrân : 64.

hukum abadi yang universal. Menurut Marcel A. Boisard,³⁸ hukum yang abadi dan berlaku secara universal adalah berawal dari suatu keyakinan bahwa manusia adalah satu dan tercipta karena kehendak yang satu, yaitu Tuhan pencipta alam. Kesadaran demikian hanya bisa tumbuh pada manusia yang menyadari prinsip-prinsip moral yang dapat mempersatukan perasaan yang merupakan dasar kebajikan universal.

Implikasi dari keyakinan bahwa seluruh manusia berasal dari sumber yang satu yaitu Tuhan, berarti manusia seluruhnya adalah makhluk Tuhan. Dengan demikian seluruh manusia adalah bersaudara karena sama-sama makhluk Tuhan. Adanya persamaan keyakinan sama-sama makhluk Tuhan dan rasa persaudaraan tersebut menurut Harun Nasution bisa menjadi landasan toleransi.³⁹ Adanya keyakinan itu mengasumsikan bahwa ciptaan-Nya juga pada hakikatnya adalah suatu kesatuan. Pandangan ini membawa pada kesimpulan bahwa seluruh jagad raya (*universe*) termasuk di dalamnya seluruh umat manusia apapun bangsa dan bahasanya adalah merupakan makhluk Tuhan juga, meskipun agama dan keyakinannya berbeda.

Seorang agamawan memang dituntut untuk mempunyai sikap yang "lebih" realistik ketika berhadapan dengan realitas empirik kehidupan masyarakat beragama yang pluralistik, terutama dalam memposisikan agama. Seperti dikemukakan oleh Hans Kung bahwa kedudukan agama harus dilihat dari dua arah, yaitu dari luar dan dari dalam.⁴⁰ *Pertama*, dari luar, diakui adanya bermacam-macam agama yang benar. Inilah dimensi relatif suatu agama. Agama-agama ini mempunyai satu tujuan yaitu keselamatan (dengan konsep berbeda-beda) dengan jalan berbeda-beda. Lewat perbedaan ini, agama-agama bisa memperkaya satu sama lain. *Kedua*, dari dalam, diakui adanya satu agama yang benar, inilah dimensi mutlak suatu agama. Pendirian ini tidak harus menolak kebenaran agama-agama lain, walaupun

³⁸Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hlm. 184.

³⁹Harun Nasution, *Islam Rasional* (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 269.

⁴⁰ST.Sunardi, "Dialog: Cara Baru Beragama Sumbangan Hans Kung Bagi Dialog Antar Agama" dalam Seri DIAN I *Dialog, Kritik dan Identitas Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan DIAN, 1994), hlm. 66-67.

benar pada tingkat-tingkat tertentu, sejauh tidak bertentangan dengan pesan agama yang dianut.

Melalui pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai etik yang fundamental yang dimiliki oleh peserta didik dapat menjadi benang merah yang dapat menghubungkan pengikut agama satu dengan lainnya sekaligus dapat menjadi *entri point* untuk mencari titik temu atau dalam terminologi al-Qur'an disebut *kalimat sawâ'*.

Bertolak dari pandangan ini, dimungkinkan bahwa Islam dapat menjadi pijakan bagi pendidikan multikultural tersebut. Konflik sosial yang mewarnai pasang surutnya persatuan Indonesia harus menjadi perhatian dan perlu diwaspadai oleh kemampuan manajemen politik bangsa agar tidak berkembang menjadi kekuatan yang memecah belah persatuan Indonesia. Salah satu cara strategis adalah pendidikan multikultural yang dilakukan secara aktual, cerdas, dan jujur.

Penutup

Pendidikan apapun bentuknya, tidak boleh kehilangan dimensi multikulturalnya, termasuk di dalamnya pendidikan keagamaan dan keilmuan, karena realitas dalam kehidupan pada hakikatnya bersifat multidimensional. Demikian juga halnya manusia sendiri pada hakikatnya adalah sebagai makhluk yang multidimensional. Karena itu untuk mengatasi problem kemanusiaan yang ada, tidak bisa lain kecuali dengan menggunakan pendekatan yang multidimensional. Dan, di dalamnya adalah pendidikan multikultural. *Wa Allâh a'lam bi al-Shawâb.**

Daftar Pustaka

Aly, Abdullah. "Pendidikan Multikultural dalam Tinjauan Pedagogik" dalam *Makalah* Seminar Pendidikan Multikultural sebagai Seni Mengelola Keragaman. Surakarta: Fak. Ekonomi UMS, Tanggal 8 Januari 2005.

Asy'arie, Musa. *Pendidikan Multikultural dan Konflik Bangsa*. <http://www2.kompas.com/kompascetak/0409/03/opini/12465.htm>. 2004.

- Banks, James A. (ed.). *Multicultural Education: Issues and Perspectives*. London: Allynand Bacon Press, 1989.
- Boisard, Marcel A. *Humanisme dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
- Ihsan, Fuad. *Dasar-dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Lash, Scott dan Mike Featherstone (ed.). *Recognition And Difference: Politics, Identity, Multiculture*. London: Sage Publication, 2002.
- Lynch, James. *Multicultural Education: Principles and Practice*. London: Routledge & Kegan Paul, 1986.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Paramadina, 1992.
- , "Hak Asasi Manusia, Pluralisme Agama, dan Integrasi Nasional (konsepsi dan aktualisasi)" dalam *HAM dan Pluralisme Agama*. Surabaya: PKSK, 1997.
- Mahfud, Choirul. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Minderovic, Zoran. *Multicultural Education/Curriculum*, dalam http://www.findarticle.com/cf_0/92602/0003/2602000388/p1/article.jhtml?term=pluralism. 2003.
- Mudyahardjo, Redja. *Filsafat Ilmu Pendidikan Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Nasution, Harun. *Islam Rasional*. Bandung: Mizan, 1995.
- Nieto, Sonia. *Language, Culture and Teaching*. Mahwah NJ: Lawrence Earlbaum, 2002.
- Pelly, Usman dan Asih Menanti. *Teori-teori Sosial Budaya*. Jakarta: Dirjen Depdikbud, 1994.
- Rachman, Budhy Munawar. "Pengantar" dalam Komaruddin Hidayat dan Muhammad wahyuni Nafis. *Agama masa Depan Perspektif Filsafat Perennial*. Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995.

- Sunardi, ST. "Dialog: Cara Baru Beragama Sumbangan Hans Kung Bagi Dialog Antar Agama" dalam Seri DIAN I, *Dialog, Kritik dan Identitas Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan DIAN.I, 1994.
- Suparlan, Parsudi. "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural," dalam Makalah yang diseminarkan pada Simposium Internasional ke-3, Denpasar Bali, 16-21 Juli. 2002.
- Suryadinata, Leo. et.al. *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003.
- Syamsuddin, M. Din. "Mengelola Pluralitas Agama" dalam harian *Jawa Pos*. 12 Mei 1996.
- Tilaar, H.A.R. *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- , *Multikulturalisme; Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- UU RI Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2003. Jakarta: Cemerlang, 2003.